

**PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA DALAM PENINGKATAN PAD SEKTOR PARIWISATA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Chevy Saifu Safitri

NPP 29.0638

Asdaf Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: chevy.saifu@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Covid-19 pandemic has put pressure on the tourism sector due to restrictions on population mobility, restrictions on transportation between countries and the closure of tourist areas. The budget management carried out by the Tourism and Culture Office of Pangandaran Regency encountered several obstacles related to the implementation of programs and activities due to declining regional income, while there was an increase in spending to cope with Covid-19. The decline in PAD revenue from the tourism sector was due to the implementation of the PPKM policy. The author focuses on the problem of budget management for the Tourism Destination Attractiveness Improvement Program in increasing the PAD of the tourism sector during the Covid-19 pandemic at the Disparbud Pangandaran Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the budget management of the Tourism Destination Attractiveness Improvement Program in increasing the PAD of the Tourism sector during the Covid-19 pandemic in the Disparbud of Pangandaran Regency along with the obstacles and efforts carried out. **Method:** This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation. Sources of data obtained from primary data and secondary data from the Department of Tourism and Culture of Pangandaran Regency. Data were analyzed by descriptive inductive analysis method based on management function theory by George R. Terry. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the budget management of the Tourism Destination Attractiveness Improvement Program in general has been carried out well, PAD from the tourism sector has increased in 2021. There are several obstacles faced, namely the limited budget for funding programs and activities. , there is no additional object of PAD in the tourism sector, the placement of employees is not in accordance with the duties and functions, internal coordination is not optimal, and PAD in the tourism sector has not been optimally absorbed. **Conclusion:** The budget management for the Tourism Destination Attractiveness Improvement Program has generally been well implemented, but there are still shortcomings where some programs and activities have not been able to be fully implemented. In order to support the management of the Tourism Destination Attractiveness Program Budget and increase PAD in the tourism sector, it is recommended to make further regulations regarding changes to the increase in tourist attraction entrance fees, expand PAD sources from the tourism sector, place competent employees in the tourism sector, optimize the implementation of meetings in planning implementation of activities, as well as implementing non-cash transactions at the entrance gates of tourism objects.

Keywords: Participation; Youth Generations; Lorong Literasi Gowa Programs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada sektor pariwisata akibat pembatasan mobilitas penduduk, pembatasan transportasi antar negara dan penutupan kawasan wisata. Pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mendapat beberapa kendala berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan akibat pendapatan daerah yang menurun, sementara terus terjadi peningkatan belanja untuk menanggulangi Covid-19. Merosotnya perolehan PAD dari sektor pariwisata diakibatkan penerapan kebijakan PPKM sehingga realisasi PAD sektor pariwisata berada pada kategori sangat rendah. Penulis berfokus pada permasalahan pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam peningkatan PAD sektor pariwisata pada masa pandemi Covid-19 di Disparbud Kabupaten Pangandaran. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam meningkatkan PAD sektor Pariwisata pada masa pandemi Covid-19 di Disparbud Kabupaten Pangandaran beserta kendala dan upaya yang dilaksanakan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Data dianalisis dengan metode deskriptif analisis induktif berdasarkan teori fungsi manajemen oleh George R. Terry. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata secara umum sudah terlaksana dengan baik, PAD dari sektor pariwisata mengalami peningkatan pada tahun 2021. Kendala yang dihadapi yakni terbatasnya anggaran untuk pendanaan program dan kegiatan, belum adanya penambahan objek PAD sektor pariwisata, penempatan pegawai belum sesuai dengan tugas dan fungsi, koordinasi internal belum optimal, dan PAD sektor pariwisata belum terserap secara optimal. **Kesimpulan:** Pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat kekurangan dimana beberapa program dan kegiatan belum mampu terlaksana sepenuhnya. Guna mendukung pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan peningkatan PAD sektor pariwisata, disarankan untuk membuat peraturan lebih lanjut tentang perubahan kenaikan tarif masuk obyek wisata, memperluas sumber PAD dari sektor pariwisata, menempatkan pegawai yang berkompeten di bidang pariwisata, mengoptimalkan pelaksanaan rapat dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan transaksi non-tunai pada gerbang masuk obyek wisata.

Kata kunci: Pengelolaan, Anggaran, Program, PAD, Pariwisata

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembagian wilayah di Indonesia telah mengakibatkan adanya pembagian urusan pemerintahan. Konsekuensi dari pembagian urusan pemerintahan ini yaitu adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk kewenangan untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah termasuk sektor pariwisata. Nasib pariwisata saat ini mengalami keterpurukan dikarenakan pembatasan mobilitas penduduk antardaerah, pembatasan transportasi antarnegara dan bahkan penutupan kawasan wisata

akibat adanya pandemi Covid-19. Dampak pada sektor pariwisata di rasakan oleh seluruh daerah di Indonesia, menurunnya kunjungan wisatawan terjadi di Tahun 2020. Berdasarkan data BPS, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama tahun 2020 menurun 75,03 persen yaitu hanya 4,02 juta kunjungan dibanding tahun 2019 yang mencapai 16,11 juta kunjungan. (Badan Pusat Statistik, 2021) Pemerintah pusat dan daerah tengah berupaya melakukan pemulihan pada sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata. Program pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program ini baru dibentuk dalam Rencana Kerja Disparbud Kabupaten Pangandaran tahun 2021 yang sebelumnya merupakan salah satu kegiatan dari Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada tahun 2020.

Pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mendapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan akibat pendapatan daerah yang menurun, sementara terus terjadi peningkatan belanja untuk menanggulangi Covid-19. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan. Namun isu yang berkembang adalah terjadinya kemerosotan perolehan PAD dari sektor pariwisata dikarenakan penerapan kebijakan PPKM.

Disparbud Kabupaten Pangandaran perlu membenahi proses pengelolaan anggaran pada program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan harapan anggaran yang dikelola bisa tepat sasaran dan mampu meningkatkan PAD pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran dari tahun sebelumnya, dan merealisasikan target pendapatan di tahun 2021.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Disparbud Kabupaten Pangandaran. Faktor utama yang menjadi dasar permasalahan yakni pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia terhitung sejak awal tahun 2020. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup signifikan pada sektor pariwisata akibat adanya pembatasan mobilitas penduduk antar daerah, pembatasan transportasi antar negara dan bahkan penutupan kawasan wisata. Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan terjadinya tekanan yang cukup signifikan pada sektor pariwisata akibat adanya pembatasan mobilitas penduduk antardaerah, pembatasan transportasi antarnegara dan bahkan penutupan kawasan wisata.

Dampak pada sektor pariwisata di rasakan oleh seluruh daerah di Indonesia, menurunnya kunjungan wisatawan terjadi di Tahun 2020. Berdasarkan data BPS, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama tahun 2020 menurun 75,03 persen yaitu hanya 4,02 juta kunjungan dibanding tahun 2019 yang mencapai 16,11 juta kunjungan. (Badan Pusat Statistik, 2021). Data ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan pada tahun 2020 semenjak diberlakukannya kebijakan penerapan protokol kesehatan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Work From Home (WFH), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan penanganan Covid-19 yang diterapkan pemerintah tentunya memiliki dampak yang begitu besar pada keuangan negara dan juga daerah yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan

meningkatnya belanja pemerintah khususnya untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian nasional.

Pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mendapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan akibat merosotnya PAD berupa pajak hotel, pajak restoran dan retribusi tempat wisata yang merupakan PAD yang bersumber dari sektor pariwisata. BPKD Kabupaten Pangandaran menuturkan pada bulan Juli 2021 pendapatan pajak hotel dan restoran yang dibukukan hanya sebesar Rp. 200.000 padahal biasanya mencapai miliaran rupiah. (sumber: news.detik.com)

Kemerosotan perolehan PAD dari sektor pariwisata terjadi sebagai dampak dari penerapan kebijakan PPKM, akibatnya sampai pada bulan agustus 2021, realisasi PAD sektor pariwisata dari 5 daya tarik wisata yang dikelola pemerintah daerah hanya memperoleh sekitar 7,8 Miliar atau 26,2% dari target 30 Miliar, dengan kategori sangat rendah. Apabila melihat pada kondisi keuangan daerah yang sedang morat-marit, maka sudah menjadi resiko jika banyak pembayaran tertunda karena anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan dampak Covid-19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan anggaran program dan kegiatan maupun pengelolaan destinasi pariwisata untuk meningkatkan PAD. Penelitian Wisesa, Hadi, & Darmansyah berjudul *Alokasi Anggaran Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Alami di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah* (Wisesa, Hadi, & Darmansyah, 2020) menemukan bahwa Pengalokasian anggaran untuk pengembangan ODTW Alami di Desa Aik Berik masih belum menjangkau semua aspek, karena anggaran hanya dialokasikan untuk membangun sarana prasarana dan jalan penghubung. Alokasi anggaran belum mencapai target pengembangan pariwisata, perawatan dan pemeliharaan, serta promosi pariwisata. Penelitian Palumpun, Rowa, & Muhi yang berjudul *Strategi Pengelolaan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan* menemukan bahwa Strategi pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Tanatoraja sudah baik namun belum optimal dikarenakan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ada sehingga diperlukan upaya-upaya strategis dalam peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD (Palumpun, Rowa, & Muhi, 2019) Penelitian Adrianto, Syamsurizaldi, & Zetra dengan judul *Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci* menemukan bahwa manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan dengan baik dengan ditemukannya beberapa kendala dalam proses manajemen program sehingga perlu dilakukan upaya untuk menyempurnakan pengelolaan program (Adrianto, Syamsurizaldi, & Zetra 2018)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian ini memiliki topik pembahasan yang berbeda dengan penelitian Wisesa, Hadi, & Darmansyah, Palumpun, Rowa, & Muhi serta Adrianto, Syamsurizaldi, & Zetra dimana penelitian

yan dilakukan merangkum topik pembahasan pada penelitian sebelumnya dengan menyatukannya menjadi topik pembahasan yang baru untuk melengkapi penelitian terdahulu yakni membahas tentang pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam peningkatan PAD sektor pariwisata pada masa pandemi Covid-19. Lokasi dan objek penelitian yang menjadi sasaran juga berbeda dengan penelitian Wisesa, Hadi, & Darmansyah, Palumpun, Rowa, & Muhi serta Adrianto, Syamsurizaldi, & Zetra. Selain itu alat analisis data yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori G.R Terry dalam GR. Terry dalam Wijaya dan Rifa'i (2016), yang menyatakan bahwa aktivitas manajemen/pengelolaan dilaksanakan sepenuhnya dengan mengacu pada fungsi-fungsi dari manajemen, sebagaimana yang dikemukakan oleh G.R Terry dalam Wijaya dan Rifa'i (2016:26) yaitu fungsi dasar dalam aktivitas manajemen terdiri dari: Planning (perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (penggerakkan), dan Controlling (pengawasan). Keempat fungsi tersebut telah banyak diketahui dengan istilah POAC.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam meningkatkan PAD sektor Pariwisata pada masa pandemi Covid-19 di Disparbud Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat disertai penjabaran kendala dan upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi berbagai kendala yang ditemukan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menjelaskan fenomena yang diperoleh di lapangan, dimana data yang diperoleh berupa kata-kata dan gambar dan tidak menekankan pada angka-angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan berpedoman pada data-data dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui pengamatan kejadian yang sifatnya aktual dengan konsep teori yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi (Sugiyono, 2017) yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena sampel yang dipilih memiliki kriteria yang dapat memenuhi kebutuhan informasi peneliti secara tepat. Informan dipilih berdasarkan struktur pada Disparbud Kabupaten Pangandaran sebanyak 5 orang, dan masyarakat Disparbud sebanyak 2 orang dengan total 7 informan, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Program
4. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
5. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata
6. Masyarakat (2 Orang)

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) yang terdiri dari aktivitas *data reduction* (reduksi data), *data display*

(penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi). Teknik ini disebut juga teknik analisis data model interaktif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam Peningkatan PAD Sektor Pariwisata pada Masa Pandemi Covid-19 meliputi :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Penyusunan DPA-SKPD
3. Pelaksanaan Anggaran
4. Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran
5. Pencatatan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (Penatausahaan)
6. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
7. Penyerahan Hasil Kegiatan Kepada Pihak-Pihak Penerima Manfaat Akhir

Penulis menganalisis pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam meningkatkan PAD sektor Pariwisata pada masa pandemi Covid-19 di Disparbud Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teori G.R Terry dalam GR. Terry dalam Wijaya dan Rifa'i (2016) yang menyatakan bahwa aktivitas manajemen/pengelolaan dilaksanakan sepenuhnya dengan mengacu pada fungsi-fungsi dari manajemen, sebagaimana yang dikemukakan oleh G.R Terry dalam Wijaya dan Rifa'i (2016:26) yaitu fungsi dasar dalam aktivitas manajemen terdiri dari: Planning (perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (penggerakkan), dan Controlling (pengawasan).

3.1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan anggaran dalam Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang mana tahun 2021 merupakan tahun akhir Renstra, sehingga Disparbud Kabupaten Pangandaran terus berupaya mencapai target akhir Renstra, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam capaian kinerja Disparbud berupa capaian target PAD sektor pariwisata di akhir tahun Renstra.

Indikator perencanaan yang dimaksud meliputi:

1. Penetapan Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Perencanaan yang dilaksanakan dalam pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berupa penetapan pelaksanaan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disparbud Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa Rencana Kerja Disparbud tahun 2021 mengalami perubahan pada pertengahan tahun anggaran. Perubahan Renja didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Nomor 800/Kpts/Disparbud/2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan DPA untuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2021 yang tercantum dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 1.

Perubahan Kegiatan dan Anggaran DPA Disparbud Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	51.209.404.934	26.525.142.132
1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	14.462.304.934	26.280.113.132
2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota	-	36.500.000.000	-
3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/Kota	2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/Kota	247.100.000	245.029.000

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan **Tabel 1** diketahui bahwa terjadi perubahan kegiatan dan perubahan anggaran pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Pada awalnya terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam program tersebut, yakni : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/Kota. Kemudian muatan kegiatan dalam program tersebut dirubah menjadi 2 (dua) kegiatan, yakni Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/Kota.

2. Penetapan Target Penerimaan PAD Sektor Pariwisata

Target PAD sektor pariwisata berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 ditetapkan sebesar 30 Miliar pada akhir renstra yaitu pada Tahun 2021, sedangkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) target PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran sesuai obyek wisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.

Target PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dan 2021

NO	OBJEK WISATA	TAHUN 2020	TAHUN 2021
		TARGET	TARGET
1	OW. Pangandaran	8.204.612.179	11.172.073.727
2	OW. Batu Hiu	426.021.102	605.905.846
3	OW. Green Canyon	269.183.451	245.152.230
4	OW. Batukaras	1.377.074.857	1.757.281.194
5	Ow. Karapyak	723.108.410	1.219.587.003
JUMLAH TOTAL		11.000.000.000	15.000.000.000

Sumber : Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016, diolah peneliti 2022

Berdasarkan **Tabel 2** target PAD Sektor Pariwisata ditetapkan sebesar 11 Miliar di tahun 2020 dan 15 Miliar pada akhir tahun anggaran 2021 dengan peningkatan target PAD sebesar 4 Miliar. Target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangan kondisi yang terjadi, dimana tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi sehingga dilakukan penutupan destinasi pariwisata yang mengakibatkan

menurunnya kunjungan wisatawan dan menurunnya serapan PAD sektor pariwisata yang diterima dari destinasi pariwisata yang dikelola pemerintah daerah.

3. Kebijakan Dalam Penetapan Target

Menuju akhir tahun anggaran 2021, terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan dalam menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya, salah satunya yakni terkait target PAD sektor pariwisata yang mengalami perubahan target dari yang semula ditargetkan mencapai 30 Miliar pada akhir tahun, kemudian target pada DPPA mengalami penyesuaian menjadi 15 miliar pada akhir tahun 2021. Kebijakan perubahan target PAD sektor pariwisata ini ditetapkan melalui rapat antara Bupati Pangandaran, DPRD, beserta pimpinan OPD terkait penetapan target penerimaan PAD.

3.2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran. Pengorganisasian dilaksanakan sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kemampuan serta keahlian dalam rencana kegiatan yang sudah direncanakan, karena tidak dapat dipungkiri kualitas dari pegawai menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program dan kegiatan begitu juga dengan penempatan pegawai sesuai tugas dan fungsinya dapat mempengaruhi terhadap optimal tidaknya anggaran dimanfaatkan dalam program dan kegiatan.

Dimensi pengorganisasian dalam pengelolaan anggaran meliputi :

1. Pengaturan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengaturan pegawai maka bagian yang paling bertanggung jawab mengenai pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu bidang destinasi pariwisata. dikarenakan hampir seluruh anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab dari Bidang Destinasi, yaitu pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Adapaun kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab dari Bidang Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Koordinasi Internal dan Eksternal

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melakukan koordinasi secara internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian maupun bidang. Pola koordinasi secara internal yang dilakukan Disparbud masih bersifat parsial, artinya hanya sebagian yang berkoordinasi dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan setiap bagian atau bidang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Pangandaran secara teknis memang dikelola serta dilaksanakan oleh Bidang yang terkait dengan program/kegiatan dimaksud. Secara eksternal, Disparbud Kabupaten Pangandaran juga melakukan koordinasi dengan *stakeholder* yang bergerak di bidang pariwisata maupun yang berkaitan dengan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Dapat disimpulkan bahwa untuk koordinasi secara internal masih belum bisa berjalan dengan maksimal dan perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut. Namun untuk koordinasi secara eksternal sudah baik dan tentunya masih perlu dioptimalkan lagi.

3.3. Penggerakkan / Pelaksanaan (*Actuating*)

Pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai SOP

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap pegawai di Disparbud ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dengan mempedomani peraturan yang berlaku serta telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Renstra Disparbud Kabupaten Pangandaran. Disparbud Kabupaten Pangandaran memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola PAD dari sektor pariwisata berupa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pelaksanaan tugas pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Tim Khusus Retribusi. Pendataan PAD dilaksanakan oleh Tim Khusus yang beranggotakan 48 orang untuk 6 (enam) titik pintu masuk, dimana setiap pintu masuk beranggotakan 8 orang yang bergantian untuk menjaga pintu masuk atau tol gate.

2. Pendataan Penerimaan PAD Sektor Pariwisata

Pendataan Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Tim Khusus Retribusi memiliki tarif yang berbeda untuk setiap destinasi tergantung kelas destinasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga dijelaskan bahwa :

Klasifikasi Tempat Rekreasi Kelas I terdiri dari :

1. Obyek Wisata Pantai Pangandaran;
2. Obyek Wisata Pantai Batu Hiu;
3. Obyek Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon;
4. Obyek Wisata Pantai Batu Karas;

Klasifikasi Tempat Rekreasi Kelas II yaitu Obyek Wisata Pantai Karapyak.

Tabel 3.

Tarif Retribusi Obyek Tempat Rekreasi Kelas I dan II

No	Jenis Kendaraan	Tarif Kelas I	Tarif Kelas II	Kapasitas Orang
1	Sepeda Motor	Rp. 10.000,-	Rp.7.500,-	2 Orang
2	Jeep/sedan dan sejenisnya	Rp. 25.000,-	Rp.18.000,-	5 Orang
3	Minibus kecil dan sejenisnya	Rp. 50.000,-	Rp.36.000,-	10 Orang
4	Minibus besar dan sejenisnya	Rp. 75.000,-	Rp.54.000,-	15 Orang
5	Bus kecil dan sejenisnya	Rp. 100.000,-	Rp.72.000,-	20 Orang
6	Bus sedang dan sejenisnya	Rp. 150.000,-	Rp.108.000,-	30 Orang
7	Bus besar dan sejenisnya	Rp. 250.000,-	Rp.180.000,-	50 Orang

Sumber : Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016, diolah peneliti 2022

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tarif retribusi antara kelas I dan kelas II. Pada Tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berencana untuk menaikkan obyek wisata pantai Karapyak menjadi kelas I, hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan PAD dari sektor pariwisata apalagi jika melihat kunjungan wisatawan yang cukup padat di momen-momen tertentu.

Disparbud Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan pembangunan fisik dan non fisik, serta melakukan pengadaan seperti masker, tempat cuci tangan dan *handsanitizer* di beberapa titik di setiap destinasi pariwisata. Selain itu pembangunan pos kendali Covid-19 untuk melakukan *screening* gejala Covid-19 bagi wisatawan kawasan destinasi pariwisata. Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga mewajibkan seluruh hotel dan restoran yang berada di destinasi pariwisata untuk menyediakan sarana prasarana pencegahan Covid-19, dengan demikian destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran telah memperoleh sertifikat CHSE (*Clean, Health, Safe Environment*) yakni sertifikat sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan kesehatan, kebersihan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan dengan tujuan menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan serta meningkatkan daya tarik terhadap destinasi pariwisata. Terbukti statistik kunjungan wisatawan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.

Jumlah Wisatawan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran

NO	OBJEK WISATA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET WISATAWAN	REALISASI WISATAWAN	TARGET WISATAWAN	REALISASI WISATAWAN
1	OW. Pangandaran	1.640.922	2.037.042	2.234.415	2.516.065
2	OW. Batu Hiu	85.204	109.113	121.181	140.043
3	OW. Green Canyon	53.837	64.230	49.030	56.770
4	OW. Batukaras	275.415	349.278	351.456	380.577
5	Ow. Karapyak	206.602	282.360	348.453	367.929
JUMLAH TOTAL		2.261.981	2.841.562	3.104.536	3.461.384

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Peningkatan kunjungan wisatawan yang terjadi pada tahun 2021 berbanding lurus dengan peningkatan PAD sektor Pariwisata di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5.

Target dan Realisasi Penerimaan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Pangandaran

NO	OBJEK WISATA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	OW. Pangandaran	8.204.612.179	10.185.207.500	11.172.073.727	12.580.325.000
2	OW. Batu Hiu	426.021.102	545.563.750	605.905.846	700.215.000
3	OW. Green Canyon	269.183.451	321.150.000	245.152.230	283.850.000
4	OW. Batukaras	1.377.074.857	1.746.387.500	1.757.281.194	1.902.885.000
5	Ow. Karapyak	723.108.410	988.259.500	1.219.587.003	1.287.752.000
JUMLAH TOTAL		11.000.000.000	13.786.568.250	15.000.000.000	16.755.027.000

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Peningkatan PAD sektor pariwisata terjadi pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, yakni sejumlah Rp. 2.968.458.750, hampir mendekati angka 3 Miliar Rupiah. Kenaikan ini juga telah mampu

mencapai target PAD sektor pariwisata yang telah mengalami perubahan menjadi 15 Miliar dengan capaian 121,5% dan melebihi target capaian.

3.4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk menghindari terjadinya penyelewengan maupun penyimpangan, baik dalam hal anggaran, ataupun prosedur serta kewenangan. Pengawasan atas pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Kabupaten Pangandaran merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal yang dimaksud yakni pengawasan yang dilaksanakan dalam lingkup Disparbud Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan oleh pemegang jabatan yang lebih tinggi kepada jabatan yang lebih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disparbud Kabupaten Pangandaran diperoleh informasi bahwa pengawasan secara internal yang dilakukan terhadap pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK-SKPD sesuai dengan ketentuan administratif, namun tidak jarang juga Kepala Dinas selaku PA menanyakan langsung kepada PPTK untuk mengetahui secara langsung kegiatan yang dilaksanakan. Begitupun pengawasan dilaksanakan oleh pemegang jabatan tertentu kepada jabatan dibawahnya.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal pada pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi. Pengawasan eksternal terhadap pengelolaan anggaran di Disparbud Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh Inspektorat, BPKP, serta BPK selaku pemerintah yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah. Selain dari unsur pemerintah, pengawasan juga dilaksanakan dari segi kontrol sosial yaitu oleh LSM dan media.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengelolaan anggaran program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang dilaksanakan tentunya diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata ke Kabupaten Pangandaran khususnya berkunjung ke beberapa destinasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, diantaranya yaitu destinasi Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Karapyak dan *Green Canyon*. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Pangandaran memiliki tujuan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi di Kabupaten Pangandaran dengan menyelenggarakan pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik, dan tentunya melaksanakan pengadaan yang bersifat menekan penyebaran Covid-19 di destinasi pariwisata, seperti penyediaan tempat cuci tangan di beberapa titik di setiap destinasi pariwisata. Selain itu pembangunan pos kendali Covid-19 untuk melakukan *screening* gejala Covid-19 dan

pengadaan masker dan *handsanitizer* untuk wisatawan yang belum menaati protokol kesehatan di kawasan destinasi pariwisata.

Penulis mendapati temuan penting yakni program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang baru diselenggarakan pada tahun 2021 secara nyata telah mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran terbukti dengan meningkatnya kunjungan wisatawan di tahun 2021 yakni sejumlah 3.461.384 orang, angka ini meningkat sebanyak 619.822 pengunjung dari tahun sebelumnya. Peningkatan kunjungan wisatawan yang terjadi tidak lepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di destinasi pariwisata, sehingga status PPKM diturunkan levelnya dan bisa membuka obyek wisata serta hotel dan restoran dengan kapasitas dan okupasi yang lebih banyak. Sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, PAD sektor pariwisata juga meningkat pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, yakni tercapai sejumlah Rp. 16.755.027.000 dengan kenaikan dari tahun sebelumnya sejumlah Rp. 2.968.458.750, hampir mendekati angka 3 Miliar Rupiah. Kenaikan ini juga telah mampu mencapai target PAD sektor pariwisata yang telah mengalami perubahan target menjadi 15 Miliar dengan capaian target sebesar 121,5% dimana telah melebihi target capaian.

Pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan dengan mengacu pada DPA Disparbud Kabupaten Pangandaran dengan salah satu kegiatan berupa pembangunan sarana prasarana, sama halnya dengan temuan penelitian Wisesa, Hadi, & Darmansyah dimana pengalokasian anggaran untuk Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) diprioritaskan untuk membangun sarana prasarana penunjang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Wisesa, Hadi, & Darmansyah, 2020). Pengelolaan anggaran program yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Pangandaran tentu tidak terlepas dari kendala salah satunya yakni dari sisi Sumber daya manusia (SDM) dimana pegawai yang ditempatkan pada jabatan atau tugas tertentu belum sesuai dengan kompetensi khususnya di bidang Pariwisata sama halnya dengan temuan Palumpun, Rowa, & Muhi dimana Sumber daya manusia (SDM) khususnya aparatur di bidang kepariwisataan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanatoraja masih sangat kurang memadai apabila dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata serta kendala dalam peningkatan PAD sektor pariwisata yakni terbatasnya anggaran untuk pendanaan program dan kegiatan, belum adanya penambahan objek PAD sektor pariwisata, penempatan pegawai belum sesuai tugas dan fungsinya, koordinasi internal masih belum optimal, dan PAD sektor pariwisata belum terserap secara optimal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Disparbud Kabupaten Pangandaran secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat kekurangan dimana beberapa program dan kegiatan belum mampu terlaksana sepenuhnya akibat ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi, kemudian koordinasi secara internal masih belum dapat terlaksana dengan baik sehingga tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman. PAD

dari sektor pariwisata mengalami peningkatan pada tahun 2021 apabila dibanding tahun 2020, namun terjadi perubahan target dari pencaipan PAD sektor pariwisata ini, sehingga belum mampu mencapai target awal yakni 30 Miliar, dan hanya mencapai 16 miliar meskipun sudah melebihi target perubahan yaitu 15 Miliar.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu dan biaya untuk penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Instansi saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat George R. Terry.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan anggaran program dan kegiatan di Disparbud Kabupaten Pangandaran untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak ditujukan kepada seluruh pihak yang berkontribusi serta mendukung terselesaikannya penelitian ini, terutama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Adrianto, Syamsurizaldi Syamsurizaldi, and Aidinil Zetra. 2018. "Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kerinci." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 3(3):226–38.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Perkembangan Pariwisata Dan Transportasi Nasional Desember 2020*. Vol. 11.
- Palumpun, Reygien Annike, Hyronimus Rowa, and Ali Hanafiah Muhi. 2019. "Stategi Pengelolaan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan." *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (11(3), 231-244.).
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Vol. 15. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Candra, and Muhammad Rifa'i. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien*. Vol. 1. Perdana.
- Wisasa, Baiq Vatriani Sasa, Ayatullah Hadi, and Darmansyah Darmansyah. 2020. "Alokasi Anggaran Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata (Odtw) Alami Di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah." *Journal of Government and Politics (JGOP)*